

*bandwagoning*²⁸. Kenneth Waltz menyampaikan bahwa terdapat cara untuk melakukan *balancing* yaitu dengan *internal balancing* dan *external balancing*. Dalam penyeimbangan secara eksternal, negara cenderung membentuk aliansi dalam rangka *balance of power*. Peneliti hendak menggunakan konsep ini karena India dan Vietnam sendiri melakukan strategi *balancing* di kawasan Indo-Pasifik dengan memperkuat kerjasama pertahanan dan memersepsikan peningkatan kekuatan China sebagai ancaman.

Pembentukan aliansi yang terdiri dari beberapa negara merupakan alasan dari tantangan adanya ancaman yang dilakukan oleh suatu negara. Menurut Walt, dibentuknya aliansi tersebut dikarenakan adanya peningkatan suatu negara yang menjadi ancaman bagi negara lain. Perbedaan antara *balance of power* dan *balance of threat* yaitu, BoP terjadi karena adanya ketidakmerataan pendistribusian kekuatan yang akhirnya negara-negara yang menyebabkan negara lain berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut meskipun belum tentu hal tersebut dianggap sebagai ancaman bagi suatu negara, sedangkan BoT merupakan respons atas ancaman yang terjadi karena kepemilikan kekuatan yang lebih besar dari sebuah negara. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa BoT terjadi jika adanya kepemilikan kekuatan yang besar dan hal tersebut mengancam suatu negara, maka negara tersebut melakukan *balancing*. Sedangkan BoP tidak menjelaskan bagaimana kekuatan yang lebih besar dimiliki suatu negara dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara lain.

Stephen M Walt dalam bukunya mengatakan bahwa 4 faktor dalam level ancaman²⁹, yaitu

1. *Aggregate Power* yang merupakan kapabilitas dan kapasitas sumber daya seperti militer, ekonomi, industri teknologi, jumlah populasi dan lainnya yang dimiliki suatu negara yang membuat negara lain memperhitungkan kekuatan agregat dari negara tersebut.
2. *Proximity* yaitu kedekatan wilayah geografis negara, jika letak geografis nya berdekatan maka ancaman pun akan semakin besar.
3. *Offensive Capability* yang merupakan kemampuan sebuah negara dalam melakukan penyerangan melalui kapasitas militer mereka, maka dari itu negara cenderung membuat sebuah aliansi.
 - a. *Offensive Intentions* yang merupakan perilaku negara yang menunjukkan sikap agresif dan dikhawatirkan mengancam negara lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena dan juga metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh satu maupun sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Alasan lainnya pun menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan mendeskripsikannya. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks³⁰. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini

²⁸ Walt, S. M. (1985). Alliance formation and the balance of world power. *International security*, 9(4), 3-43.

²⁹ Walt, S. M. (1985). Alliance formation and the balance of world power. *International security*, 9(4), 3-43. Hal 9-12

³⁰ Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

digunakan untuk mendeskripsikan tentang pengaruh peningkatan kapabilitas militer Jepang terhadap stabilitas keamanan di kawasan Indo Pasifik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena dalam usulan penelitian ini peneliti menggunakan metode yang berupa data-data deskriptif dengan mendapatkan informasi studi kepustakaan. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata dan lisan dari masyarakat dan mengamati perilaku yang terjadi dalam masyarakat sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.³¹

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kejadian-kejadian berdasarkan data-data yang terkumpul kemudian di analisis keterkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini, Penelitian ini deskriptif menyajikan suatu gambar terperinci tentang situasi khusus, setting social.³²

Di samping berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi, tipe penelitian juga memberi gambaran menyeluruh mengenai situasi yang sedang dipelajari, dengan penggunaan metode penelitian dimaksudkan untuk bertujuan memberikan gambaran peristiwa-peristiwa secara cermat dan detail sehingga dapat di peroleh pemahaman tentang peristiwa yang telah terjadi.³³ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pengaruh peningkatan kapabilitas militer Jepang terhadap stabilitas keamanan di kawasan Indo Pasifik.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁴

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui literatur seperti penelitian, buku dan jurnal, laporan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk membantu dalam kelengkapan data di dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Di sini penulis akan mencari referensi dengan menggunakan literatur seperti penelitian, buku dan jurnal. Studi kepustakaan ini digunakan untuk membantu dalam kelengkapan data di dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang

Pada latar belakang telah dijelaskan mengenai peningkatan kapabilitas Jepang yang sejalan dengan revisi dari pasal 9 konstitusi Jepang. Konsitusi tersebut mewajibkan Jepang untuk melakukan demiliterisasi. Perubahan situasi politik internasional mengharuskan Jepang untuk menyesuaikan konstitusi tersebut. Salah satu perubahan yang dilakukan Jepang yaitu dengan merevisi konstitusi Pasal 9 Jepang dengan melakukan reinterpretasi dari konstitusi tersebut. Selanjutnya, pada bab ini digambarkan bagaimana penerapan kebijakan pertahanan Jepang sejak 2014 yang berkaitan dengan perluasan peran militer Jepang di kawasan Indo Pasifik. Selanjutnya, dibahas mengenai penguatan kerjasama pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat.

Sistem Internasional yang selalu berubah menyebabkan suatu negara cenderung menyesuaikan kemampuannya dalam beradaptasi. Kemampuan beradaptasi tersebut

³¹ Melong, J. Lexy, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007) 4.

³² Basorwi dan Surwati, Memahami Penelitian Kualitatif ‘’, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)37.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., hlm. 224.

dapat muncul dikarenakan adanya suatu ancaman. Ancaman tersebut baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi negara dalam memperkuat sistem pertahanannya, tak terkecuali Jepang. Sejak Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan tunduk pada Deklarasi Postdam, Jepang memiliki konstitusi Pasal 9 yang menjadikan Jepang sebagai pemain pasif dalam bidang militer. Kekuatan militer Jepang hanya berpusat pada pasukan tentara bela diri Jepang (Japan Self Defense Force) yang ditempatkan di beberapa pulau di sekitar Jepang dan tidak mendapatkan izin untuk melakukan operasi di luar negeri³⁵. Japan Self Defense Force merupakan pasukan bela diri yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dikarenakan Jepang harus menerapkan konstitusi Pasal 9 sehingga kekuatan militer Jepang terbatas³⁶.

Penduduk Jepang dalam survei yang dilakukan oleh The Asahi Shimbun pada 2 Mei 2017 memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang menentang adanya revisi dari konstitusi Jepang. Pada tahun 2016, hasil survei menunjukkan 55% persen menyatakan bahwa melakukan perubahan pada konstitusi tidak diperlukan, sementara 37% menjawab perlu adanya perubahan konstitusi. Setengah dari para responden menentang adanya revisi apapun di bawah administrasi Abe, sementara 38% mendukung adanya revisi³⁷.

Ultranasionalisme di Jepang yang begitu kuat menjadi faktor yang mendukung adanya perubahan konstitusi Jepang. Fenomena tersebut telah menjadi bagian dari sejarah Jepang dan sangat mempengaruhi pemikiran politik dari para elit politik Jepang dan pembuat kebijakan yang membuat pengaruh bagi masyarakat Jepang³⁸.

Revisi yang dilakukan oleh Jepang bukanlah melakukan amandemen melainkan yaitu berupa reinterpretasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang. Reinterpretasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang dijelaskan dalam buku putih tahunan Jepang (Annual White Paper Defense of Japan 2017) sebagai perubahan penafsiran atas penggunaan kekuatan militer Jepang. Jepang diperbolehkan untuk mengambil langkah mempertahankan diri ketika muncul ancaman dari negara lain terhadap lingkungan sekitar Jepang dan berdampak pada kelangsungan hidup Jepang. Ketika Jepang mendapatkan ancaman secara tidak langsung maka Pasal 9 mengizinkan Jepang untuk menggunakan kekuatannya dengan batas minimum sebagai langkah mempertahankan diri³⁹.

Abe melihat perlu adanya peningkatan kapabilitas militer. Jepang tidak akan bertahan apabila tidak mengembangkan sektor militer Jepang. Anggaran belanja militer Jepang dinaikan secara berkala yang nantinya digunakan untuk memproduksi atau membeli pesawat pengintai, rudal anti balistik ataupun senjata lainnya. Alasan Abe untuk melakukan revisi dari kebijakan pertahanan salah satunya adalah adanya ketegangan antara Jepang dan Cina di Laut Cina Timur yaitu sengketa teritorial dan agresifitas Cina pada konflik Laut Cina Selatan. Kewaspadaan atas pengaruh politik dan ekonomi yang meningkat serta modernisasi militer Cina yang cenderung cepat. Keberadaan nuklir Korea Utara juga menjadi pertimbangan Jepang dalam merevisi konstitusi. Jepang juga ingin memberikan kontribusi lebih bagi aliansi Jepang dengan Amerika Serikat melalui

³⁵ Wildan Faisal, "Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014" Jurnal 2015 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (2015): 2.

³⁶ Rizki Roza. "Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan", 6.

³⁷ The Asahi Shimbun, "Poll: 50% Oppose Constitutional Revision; Those in Favor Rise to 41%", The Asahi Shimbun,

³⁸ Michael Panton, "Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese Constitution" Asian-Pacific Law & Policy Journal 11 (2010): 196.

³⁹ "Section 2: Constitution and the Basis of Defense Policy dalam Part II: Japan's Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance" Japan Ministry of Defense,

pelaksanaan Collective Self Defense yang memungkinkan militer Jepang melindungi kapal Amerika Serikat dan membantu membersihkan ranjau di Teluk Persia.

Konstitusi Pasal 9 Jepang melarang adanya penggunaan militer namun setelah keluarnya perundang-undangan tahun 2015 memungkinkan Jepang untuk berpartisipasi dalam collective security operations atau operasi keamanan kolektif dan untuk pertama kalinya personel Self Defense Forces dapat terlibat dalam sebuah pertempuran untuk mendukung Amerika Serikat saat melindungi Jepang atau mendukung mitra keamanan yang lain saat mendapatkan serangan, seperti contoh apabila kapal Amerika Serikat terkena serangan saat membantu melakukan evakuasi warga Jepang dari sebuah konflik, maka Jepang dapat menggunakan kekuatan militernya. Reformasi Jepang tersebut menunjukkan keberlanjutan dan bukan sebuah perubahan dimana dalam pola ketergantungan Jepang pada Amerika Serikat atas keamanannya, Jepang dapat membantu lebih pada aliansinya yaitu Amerika Serikat saat lingkungan keamanannya memburuk⁴⁰.

Abe dikenal nasionalis dan sejak lama mengupayakan adanya perluasan peran militer Jepang. Konstitusi Pacifist Jepang hanya mengizinkan Jepang untuk memiliki kekuatan militer yang terbatas dan hanya untuk keperluan pertahanan. Menurut Abe pembatasan tersebut sudah tidak relevan di tengah kondisi di kawasan Indo Pasifik yang terus bergejolak. Stabilitas kawasan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Jepang terlepas dari adanya naungan payung keamanan Amerika Serikat. Perdana Menteri Abe memperjuangkan rancangan undang-undang terkait perluasan peran militer Jepang yang pada akhirnya mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi dengan hasil voting 148 suara mendukung dan 90 suara menolak pada 19 September 2015. Keberhasilan tersebut dikarenakan dominasi Partai Demokratik Liberal dan Koalisinya Partai Komeito serta dukungan partai kecil baik di majelis rendah maupun majelis tinggi.

Undang – Undang pertahanan yang baru mengubah posisi Jepang yang dikenal sebagai negara pasifis dan memungkinkan Jepang untuk mengirimkan tentaranya ke luar negeri serta penghilangan hambatan geografis pada dukungan logistik untuk pasukan dalam “situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi keamanan Jepang”. Selain itu, Jepang dimungkinkan memiliki peran yang lebih aktif dalam operasi-operasi penjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Melalui Buku Putih Pertahanan Jepang 2014 Abe mengklaim perubahan kebijakan memang dibutuhkan dalam rangka memastikan kemampuan Jepang di tengah tantangan-tantangan keamanan yang terus berkembang di kawasan, salah satunya berkembang pesatnya kekuatan dan teknologi militer Cina⁴¹.

Dalam Defense Programs and Budget of Japan tahun 2017 Jepang meningkatkan kapabilitas pertahanannya dengan mengembangkan the Dynamic Joint Defense Force berdasarkan National Defense Program Guidelines tahun 2014 serta Medium Term Defense Program tahun 2014-2018 yang disahkan oleh kabinet pada 17 Desember 2013.

Dynamic Joint Defense Force digunakan sebagai landasan untuk perlindungan keamanan dan perdamaian Jepang. Pengembangan pertahanan Jepang yang tertuang dalam National Defense Program Guidelines (NDPG) memberikan pengaruh besar karena memungkinkan Jepang untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang selalu berubah di sekitar Jepang serta mewujudkan pengembangan kemampuan pertahanan yang lebih efisien berdasarkan penilaian yang terdapat pada NDPG.

⁴⁰ Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution” Policy Analysis Cato Institute 788 (Februari 2016): 2.

⁴¹ Rizki Roza, “Perluasan Peran Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik” Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi DPR RI 7 (September 2009): 6.

Ekspansi Pengaruh Militer Jepang di Indo-Pasifik

Konflik Laut Cina Selatan menjadi salah satu konflik yang cukup besar bagi kawasan Asia Tenggara dan juga Indo Pasifik. Jepang memiliki peran dalam mendukung negara yang terlibat konflik tersebut seperti Vietnam. Jepang menjanjikan enam kapal patroli kepada Vietnam pada kunjungan Perdana Menteri Abe ke Asia Tenggara. Kapal patroli tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Vietnam dalam penegakan hukum maritim terkait dengan konflik Laut Cina Selatan. Jepang yang merupakan investor asing Vietnam terbesar setelah Korea Selatan tidak memiliki klaim wilayah dalam konflik Laut Cina Selatan⁴².

Wilayah Laut Cina Selatan memiliki peran besar dalam geopolitik karena menjadi titik temu antara Cina dan negara – negara yang berada dalam wilayah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam hal teritorial, keamanan, dan sumber daya alam serta ketahanan energi. Persengketaan di wilayah tersebut mencakup kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Wilayah Laut Cina Selatan terdiri dari antara lain beberapa pulau kecil yang tersebar luas, namun terdapat dua kelompok pulau yang banyak diperebutkan yaitu Kepulauan Spratly dan Paracel. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan menjadi jalur pelayaran penting dan seringkali disebut sebagai maritime superhighway karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Setengah dari lalu lintas supertanker dunia berlayar melalui jalur tersebut melewati Selat Malaka, Selat Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang lewat bahkan lebih banyak dari wilayah lalu lintas yang melewati Kanal Suez serta Kanal Panama.

Jepang meningkatkan kehadirannya di kawasan Laut Cina Selatan pada 2016. Kehadiran tersebut berupa patrol udara dengan pesawat P-3C milik Jepang dan melakukan pemberhentian di beberapa negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan seperti Filipina dan Vietnam. Pesawat tersebut sebelumnya digunakan untuk aktifitas pencegahan perompak di lepas pantai Somalia.

Dukungan Jepang terhadap negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan lainnya yaitu Filipina. Jepang memberikan 10 kapal patroli kepada Filipina untuk membantu Filipina dalam meningkatkan keamanan dan penegakan hukum laut di Laut Cina Selatan. Kapal tersebut hanya dapat digunakan untuk operasi keamanan laut dan tidak diperuntukkan untuk bertempur. Selain itu, kapal – kapal tersebut juga digunakan untuk tujuan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam.

Jepang mengalami security dilemma terhadap Cina dimana Jepang menganggap Cina sebagai sebuah ancaman terhadap keamanannya. Anggapan tersebut didasari oleh yang pertama adalah masalah Nasionalisme Cina dengan menunjukkan sikap yang dianggap berlebihan mengakibatkan reaksi yang cenderung menilai Cina agresif dalam berhubungan dengan negara di kawasan Asia Timur terutama negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik Cina di Selat Cina Selatan dan di Taiwan. Kedua, Cina telah berhasil mengembangkan persenjataan canggih yang mampu mengimbangi persenjataan pertahanan Jepang serta melakukan pengembangan mesin perang untuk tindakan yang bersifat offensive. Ketiga, kemajuan ekonomi dan industri yang dicapai Cina sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dengan Jepang untuk mendapatkan pasokan energi.

Sementara itu, Cina merasakan kekhawatiran dengan kemajuan teknologi militer Jepang dikarenakan yang pertama, kemampuan dan kemajuan yang dimiliki oleh Jepang

⁴² Mai Nguyen, "South China Sea: Japan to supply new patrol boatsto Vietnam" The Sydney Morning Herald,

Jepang Proactive Contribution to Peace. Revisi tersebut juga merefleksikan keputusan kabinet Jepang pada 1 Juli 2014 yang merubah interpretasi dari konstitusi Jepang dan bertujuan untuk membuka kemungkinan terwujudnya hak pertahanan kolektif, yang sebelumnya memiliki keterbatasan karena Pasal 9 konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang Pasal 9 menjadi penghambat bagi kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Abe bersikeras bahwa konstitusi Jepang yang lebih dikenal dengan Pasifisme Jepang harus diperbaharui karena cenderung membatasi kekuatan militer dan pasifisme tersebut sudah mengakar bagi kehidupan masyarakat Jepang⁴⁵.

Setelah mengeluarkan reinterpretasi resmi mengenai Konstitusi Pasal 9 yang menyatakan Jepang dapat melakukan Collective Security, Perdana Menteri Jepang Abe mengunjungi Washington dan menandatangani revisi lainnya dari panduan kerjasama pertahanan (Guidelines for Defense Cooperation) antara Jepang dan Amerika Serikat. 61 Ancaman nuklir dan program misil Korea Utara menjadi salah satu masalah yang membuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat menguat. Nuklir Hwasong-14 milik Korea Utara dapat menjangkau 8.000 hingga 10.000 kilometer, sedangkan Hwasong-13 dapat menjangkau wilayah Florida Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Jepang memiliki kemauan dan mampu untuk menghentikan ancaman nuklir tersebut melalui langkah militer⁴⁶.

Pada panduan pertahanan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat 2015 membahas mengenai perluasan peran Amerika Serikat untuk membela Jepang. Selain itu, guidelines atau pedoman tersebut juga memperdalam kerjasama pertahanan bilateral dalam bidang intelejen serta pengembangan senjata. Personil militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang berjumlah kurang lebih 100 ribu personil lebih banyak dari negara aliansi Amerika Serikat lainnya, yaitu lebih dari 39.000 personil. Panduan kerjasama pertahanan tahun 2015 juga membahas mengenai peran lebih Jepang untuk aliannya dalam mempromosikan kerjasama keamanan baik dengan mitra regional maupun di seluruh dunia.

Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Amerika Serikat menguatkan kedekatan dengan aliansi di kawasan terlihat dengan upaya Perdana Menteri Jepang Abe telah melakukan pertemuan dengan Trump pada bulan November 2016 serta melakukan kunjungan resmi ke Gedung Putih dua bulan kemudian. Pertemuan antara Abe dan Trump pada Februari 2017 telah menaruh perhatian dari kedua negara pada sengketa maritim dengan mengeluarkan pernyataan bersama (Joint Statement) mengenai pentingnya kebebasan bernavigasi dan menentang segala bentuk upaya klaim maritim melalui penggunaan paksaan serta kekerasan. Abe dan Trump mengingatkan negara yang sedang dalam konflik maritim untuk menghindari tindakan militerisasi di pos terdepan dan selalu bertindak sesuai dengan hukum internasional. Pada Maret 2017 Sekretaris Negara Amerika Serikat Tillerson mengunjungi Jepang untuk lebih meyakinkan Jepang atas aliansi kedua negara⁴⁷.

Amerika Serikat memperkuat komitmen dari aliansi Jepang – Amerika Serikat, salah satu hal yang diperhatikan dalam langkah Trump adalah dengan membantu Jepang dalam mempertahankan Kepulauan Senkaku yang di klaim Cina masuk ke dalam wilayahnya sebagaimana dengan Pasal 5 dari perjanjian (treaty) antara Jepang dan

⁴⁵Kamiya Matake, "Nothing New about Japan's "Proactive Contribution to Peace", The Japan Journal (November 2014),

⁴⁶ Michinobu Yanagisawa, "Japan-U.S. alliance key to dealing with global threat from N. Korea", The Japan News

⁴⁷ Bates Gill, "Pivotal Days US-Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration", 12.

Cina yang mirip seperti buku putih pertahanan Cina sebelumnya dan menjelaskan pula hubungan antar militer dengan mengedepankan sikap “pertahanan aktif”⁵⁰.

Cina memiliki program modernisasi angkatan bersenjata sebagai upaya peningkatan kemampuan militernya yang berfokus pada pembelian peralatan tempur khususnya untuk angkatan udara dan laut serta peningkatan kemampuan dari intercontinental ballistic missile (ICBM) dari PLA. Selain itu, Cina mengembangkan kemampuan peluru kendali dalam kelas short-range ballistic missile (SRBM), intermediate-range ballistic missile (IRBM) dan medium-range ballistic missile (MRBM). Kekuatan dari peluru kendali dalam kelas tersebut mampu memberikan ancaman kepada negara - negara di kawasan Asia Timur serta basis-basis militer Amerika Serikat yang berada di benua Asia⁵¹.

Kekuatan PLA didukung dengan peralatan militer yang mumpuni. Helikopter serang PLA dilengkapi dengan amunisi yang dapat dikendalikan untuk jarak tertentu dari sasaran yang dituju, sensor, data link untuk berkomunikasi, serta peralatan elektronik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Pada 2017, Cina meluncurkan peralatan militer dengan banyak variasi kemampuan diantaranya kapal induk kedua CV-17, kapal angkut amfibi tipe 071 Yuzhaoclass, penangkal misil terpadu tipe 052D Luyang III-class destroyer, pesawat penyerang tipe J-20 untuk mendukung kekuatan udara Cina, dan medium-range ballistic missiles (MRBMs) tipe DF-16A yang dapat menempuh jarak sekitar 1000 Km⁵².

Kapabilitas nuklir, rudal serta kekuatan militer yang berpusat pada angkatan laut dan udara telah ditingkatkan secara ekstensif dan cepat dalam beberapa tahun terakhir. The Chinese People’s Liberation Army (PLA) sedang melakukan reformasi organisasi yang telah berjalan dengan cepat. Pada Desember 2015 Cina membentuk Angkatan Roket (The rocket Force), Pasukan Pendukung Strategis (Strategic Support Force), dilanjutkan pada Januari 2016 Departemen Umum yang menjadi markas besar seluruh PLA digantikan oleh 15 bagian fungsional dibawah sebuah Komisi Militer Pusat (CMC). Satu bulan berikutnya yaitu pada Februari, PLA menghapuskan tujuh wilayah militer (Seven Military Regions) dan membuat baru menjadi “Lima Teater Operasi” (Five Theaters of Operations). Rangkaian reformasi tersebut dirancang untuk membangun kekuatan militer yang sanggup melaksanakan perang dan menghasilkan kemenangan, namun Cina belum menetapkan tujuan jelas dan terinci mengenai penguatan kapabilitas militernya⁵³.

Korea Utara telah menurunkan sekitar 70% kekuatan daratnya ke garis Pyongyang-Wonsan dan beberapa pasukan telah dipersiapkan untuk membuat serangan dari posisi aman di sekitar perbatasan bagian utara dari Garis Demarkasi Militer (The Military Demarcation Line). Artileri 170 mm self propelled dan peluncur roket 240 mm digunakan oleh Korean People’s Army (KPA)⁵⁴.

Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat dan kelima pada tahun 2016 serta melakukan puluhan uji coba rudal balistik sepanjang tahun 2016 dan awal 2017. Korea Utara diyakini memiliki ratusan rudal Nodong-1 yang mampu hingga mencapai Tokyo,

⁵⁰ Anthony H. Cordesman, “Chinese Strategy and Military Modernization in 2017: A Comparative Analysis”, Center For Strategic & International Studies12 (Januari 2017): 109.

⁵¹ Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 8

⁵² Michael, R. Danis, “USCC 2017 Annual Report: 2017 Report to Congress of the U.S-China Economic and Security Review Commission”, U.S. Government Publishing Office (November 2017)

⁵³ “Chapter 2 :Japan's Foreign Policy that Takes a Panoramic Perspective of the World Map, Diploamatic Bluebook 2017”

⁵⁴ 7II-Young Jeong, ”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”, 145

Jepang. Pada Maret 2017, Korea Utara menembakan setidaknya empat rudal balistik ke arah barat laut Jepang dengan tiga diantaranya mendarat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Jepang sekitar 250-kilometer dari pantai Jepang⁵⁵.

Apabila dilihat dari segi kuantitas, India merupakan kekuatan militer yang besar dengan lebih dari 1,3 juta pasukan baik itu laki-laki maupun perempuan dengan tentara cadangan sebanyak satu juta personel. Angkatan Udara India memiliki lebih dari 665 pesawat tempur yang mampu berperang dan 40 kapal serta kapal selam termasuk kapal induk, kapal perang amfibi dan kapal selam pembawa nuklir (nuclear submarines). Pembagian angkatan bersenjata India meliputi Angkatan Darat India (Indian Army), Angkatan Laut India (Indian Navy), Angkatan Udara India (Indian Air Force), dan Indian Coast Guard⁵⁶.

Indian Army menjaga situasi keamanan dari datangnya ancaman eksternal maupun internal, seperti situasi di Jammu & Kashmir, Hinterland, India bagian timur utara, perbatasan India dengan Cina. Selain itu, Indian Army juga melakukan kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang ramah (Friendly Foreign Countries) seperti mengadakan training and joint exercise, mengikuti dan ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) Plus. Perlalatan militer yang dimiliki oleh Indian Army meliputi Rocket System, Missiles, Howitzers serta Ballistic Helicopters, Anti-Tank Guided Missiles (ATGM), dan Rashtriya Rifles.

Indian Navy memiliki peran diantaranya menjaga keamanan pesisir, Operasi anti - pembajakan, Operasi luar negeri (Overseas Operations), serta melakukan patroli terkoordinasi dengan Indian Ocean Region Littoral Navies. Indian Air Force memiliki perangkat seperti helikopter jenis Apache dan Chinook CH-47F, pesawat dengan jenis Rafale, C-130J, serta Tejas. Selain itu, perangkat militer dengan spesifikasi presisi tinggi dan mematikan meliputi Brahmos Surface to Surface Missile firing, MICA Air-To-Air Missile, Medium Range Surface to Air Missile (MRSAM), Akash Missile System, serta radar pertahanan udara.

Istilah tentang anggaran atau pengeluaran belanja militer adalah menjelaskan tentang keseluruhan pengeluaran suatu negara dalam bidang militer (armed forces), kekuatan penjagaan perdamaian (peace keeping), anggaran dalam kementerian pertahanan lainnya yang berkaitan dengan pertahanan. Pengeluaran belanja militer meliputi kekuatan militer dalam latihan, dilengkapi dengan senjata hingga masa diperlukan dalam melakukan operasi militer atau peperangan. Pengaruh eksternal yang menyebabkan suatu negara meningkatkan anggaran militernya adalah munculnya konflik bersenjata dan aliansi-aliansi yang terbangun antar negara. Konflik bersenjata tidak selalu diartikan sebagai pertempuran antar negara secara terbuka, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai perlombaan senjata, konflik wilayah, ancaman dan unjuk gigi kekuatan militer suatu negara yang kemudian dapat disebut sebagai non combat conflict.

Sejak 2007, anggaran militer dari negara-negara di kawasan Asia dan kepulauan di wilayah Pasifik (Oceania) mengalami kenaikan. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa wilayah Asia Timur merupakan yang terbesar dalam kenaikan anggaran, kemudian wilayah Asia Tengah dan Selatan, lalu Asia Tenggara. Anggaran militer wilayah Oceania mengalami fluktuatif setiap tahunnya, seperti dari tahun 2007 hingga 2010 mengalami peningkatan dan kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2013 kemudian meningkat kembali hingga 2016.

⁵⁵ Bates Gill, "Pivotal Days US-Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration", 13.

⁵⁶ "Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India" Ministry of Defense Government of India,

Peningkatan Anggaran Militer Negara-Negara di Indo Pasifik

Peningkatan anggaran belanja militer Cina dapat disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama yaitu faktor internal berasal dari dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan program modernisasi militer Cina. Kedua yaitu faktor eksternal seperti munculnya ancaman keamanan stabilitas di kawasan Asia Timur yang mempunyai pengaruh bagi Cina untuk mengambil kebijakan meningkatkan anggaran belanja pertahanan serta militer. Ancaman stabilitas tersebut berasal dari sengketa wilayah teritori perairan antara Cina dengan beberapa negara lain seperti Jepang serta kehadiran aliansi JepangAmerika Serikat dan juga pengalaman sejarah masa lalu diantara Cina dan Jepang. Peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata Cina didasarkan pada kesinambungan yang sama antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan angkatan bersenjata Cina di masa yang akan datang dengan mengutamakan modernisasi pertahanan dalam tubuh angkatan bersenjata yang memiliki efisiensi tinggi dan pendanaan yang rendah⁵⁷. Dilihat dari anggaran militer, hampir setiap tahunnya Cina melakukan peningkatan presentase anggaran persenjataan selalu diatas 10 persen.

Menurut SIPRI, Australia mengalami peningkatan dalam anggaran militernya. Terhitung dari tahun 2014, Australia mengalami peningkatan sekitar dua ribu dolar Amerika pada 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi sekitar 24371 juta dolar Amerika. Pada tahun 2012-2013 dan 2016-2017, Australia melakukan mengeluarkan sebesar 10,3 miliar dolar Amerika kepada Foreign Military Sales untuk pengadaan sistem penunjang seperti broadcasting and telecommunication contracts, engineering, research and technology-based services contracts dan bahkan mengalokasikan setidaknya 500 juta dolar untuk penunjang informasi dan teknologi (IT). Australia juga melakukan pembelian sekitar 815 juta dolar Amerika untuk kontrak peningkatan GBU-52/B Small Diameter Bombs dan 360 juta dolar Amerika untuk ADF's helikopter berjenis MH-60R Multi-Mission.

Australia melihat Jepang sebagai kekuatan yang besar di Asia Utara dan sangat penting kontribusinya dalam menjaga keamanan regional dan global. Australia menyambut baik usaha peningkatan kapabilitas militer Jepang dalam memainkan peran yang lebih luas dan berkontribusi lebih efektif pada stabilitas keamanan regional dan global.

Anggaran pertahanan India mengalami kenaikan sebesar 6.2 persen pada 2017. Jumlah tersebut 12,78 persen dari total pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 21,47 lakh crore. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan angka kenaikan tahun 2015 - 2016. Alokasi anggaran pertahanan pada 2016 sekitar 10,5 persen. Kenaikan pada tahun 2017 sebesar 9,14 persen⁵⁸. Menurut laporan tahunan Menteri Pertahanan India 2016-2017, total anggaran pertahanan India pada 2014 yaitu sebesar 218.694 crore, dan meningkat menjadi 237.045 crore dan 259.161 pada 2017⁵⁹. Pemerintah India menginginkan adanya modernisasi, perluasan, serta meningkatkan kemampuan operasional angkatan bersenjatanya. India yang sebelumnya menempati posisi ke 6 dalam 15 negara dengan anggaran militer tertinggi pada 2016, naik menjadi posisi ke 5 mengungguli Prancis.

Peningkatan anggaran militer India disebabkan oleh kenaikan biaya operasional angkatan bersenjata yang mencakup lebih dari 83 persen atau sekitar Rs. 11,071 crore

⁵⁷ Adi Joko P, "Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur", 6.

⁵⁸ TNN & Agencies, "Union Budget 2017: Defence allocation gets 6.2 percent hike" The Times of India

⁵⁹ "Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India" Ministry of Defense Government of India,

(rupee). Pada tabel persebaran dari alokasi belanja pertahanan India dari tahun 2014 hingga 2017 cenderung digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan dari personel militer India sementara modernisasi serta perbaikan perlengkapan militer India cenderung menurun.

Dampak Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang di Indo Pasifik

• Upaya Balance of Power di Kawasan

Peningkatan kekuatan militer Jepang merupakan wujud dari normalisasi militer yang dilakukan oleh Jepang. Hal tersebut salah satu yang mempengaruhinya yaitu Cina. Cina menaikkan anggaran militer secara perlahan, terlihat dari 2014 hingga 2016 rata-rata kenaikan anggaran militernya sebesar 138335 dolar Amerika⁶⁰. Hal tersebut menunjukkan bahwa Cina dapat kapan saja menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan.

Sejak 2014, Jepang menaikkan anggaran militernya mulai dari 4,78 triliun yen, 4,82 triliun yen pada 2015, 4,86 triliun yen pada 2016 dan 4,90 triliun yen pada 2017. Lebih rinci lagi, kenaikan anggaran dalam bidang pertahanan Jepang terjadi pada biaya pemeliharaan, pengembangan fasilitas serta penelitian dan pengembangan. Terlebih lagi, anggaran dari setiap bagian Japan Self Defense Force seperti Ground Self Defense Force (GSDF), Maritime Self Defense Force (MSDF), dan Air Self Defense Force (ASDF) juga meningkat dari tahun 2014 hingga 2017.

Menurut Waltz, disamping kondisi internasional yang anarki, stabilitas tidak tergantung pada apakah sistem internasional berbentuk bipolar atau multipolar, namun bergantung pada beberapa kutub konstan dalam sistem. Bangkit dan jatuhnya kutub tersebut akan memicu perubahan dalam pengaturan sistem internasional. Stabilitas keamanan dapat sewaktu-waktu terancam. Barry Buzan mendefinisikan keamanan sebagai fenomena yang selalu memiliki keterkaitan. Keamanan sebuah negara ataupun kawasan harus dipahami melalui pemahaman pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara tersebut.

Potensi ancaman terbesar bagi Jepang adalah Cina. Cina masuk dalam prioritas utama ancaman keamanan bagi Jepang dari militer dan ekonomi. Usaha Jepang dalam mencegah ancaman dari Cina yaitu dengan mengembangkan kapabilitas militernya melalui aliansi yang berpusat pada aliansi Jepang - Amerika Serikat serta penguatan hubungan dengan Australia, India, dan negara anggota ASEAN⁶¹.

Dalam keadaan dunia internasional yang anarki, Cina merupakan ancaman bagi Jepang. Jika dibandingkan, kekuatan maritim antara Jepang dan Cina terlampau cukup jauh pada 2015. Cina dengan total 303 armada tempur laut yang terbagi dalam 79 armada tempur besar, 107 armada tempur kecil, 53 berjenis kendaraan dua medan darat (amphibi) dan laut serta 64 kapal selam. Sedangkan Jepang hanya berjumlah 67 armada dengan 46 armada tempur besar, 3 berjenis amphibi, dan 18 kapal selam⁶².

Cina yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Jepang membuat dibutuhkannya sebuah usaha balancing agar tidak menimbulkan sebuah hegemoni dari satu negara. *Balancing* yang dilakukan Jepang meliputi *Hard Balancing* dan *Soft Balancing*. Stabilitas keamanan akan terganggu dengan tidak seimbangannya kekuatan

⁶⁰ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

⁶¹ Xenia Dormandy. "Asia Pacific Security A Changing Role for the United States" Chatham House Report (April 2014): 15

⁶² Yoshikazu Watanabe, Masanori Yoshida, Masayuki Jironaka, The U.S.-Japan Alliance and Roles of The Japan Self-Defense Forces: Past, Present, and Future (Washington: Sasakawa Peace Foundation ,2016), 36

antara Jepang dan Cina, maka dari itu Jepang cenderung mewujudkan balance of power dikawasan dengan menggunakan instrument penguatan kerjasama aliansi Jepang - Amerika Serikat. Selain dengan Amerika Serikat, Jepang juga memiliki kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Indo Pasifik seperti India, Australia, Korea Selatan, Filipina dan Indonesia. Bentuk dari kerjasama tersebut seperti Japan - Australia Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise pada 2016, Exercise Corp North Guam pada 2017, Exercise Southern Jackaroo pada 2017, anti - submarine warfare exercise pada 2017, dan latihan Malabar

Kerjasama berupa latihan bersama tersebut dilakukan oleh aliansi Jepang - Amerika Serikat dengan negara di kawasan Indo Pasifik. Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk soft balancing yang dilakukan Jepang karena berbentuk sebuah latihan militer bersama. Selain melalui latihan bersama, Jepang juga meningkatkan patroli udara pada 2016 di sekitar wilayah Laut Cina Selatan menggunakan pesawat P-3C. Kemunculan pesawat patrol P-3C tersebut memperlihatkan pergerakan Japan Self Defense Force di kawasan, terlebih lagi untuk mengawasi eskalasi militer yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Patroli tersebut dilakukan bersamaan dengan patroli yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Apabila dilihat dari wilayah, Jepang telah memfasilitasi keberlangsungan kehadiran Amerika Serikat di Indo Pasifik sehingga mendorong aliansi antara kedua negara untuk menciptakan stabilitas bagi kawasan. Selain dihadapkan dengan ancaman yang datang dari Cina, penguatan aliansi Jepang dengan Amerika Serikat juga sebagai bentuk dari balance of power terhadap Korea Utara yang meningkatkan kemampuan nuklirnya. Setidaknya dari Februari hingga Oktober 2016 Korea Utara sudah melakukan lima kali uji coba rudal balistik dengan berbagai tipe seperti Hwasong (KN), Scud ER, Nodong, Scud-C, dan Unha-4. Klasifikasi dari rudal balistik tersebut juga bermacam-macam seperti intercontinental ballistic missile (ICBM), intermediate-range ballistic missile (IRBM), medium-range ballistic missile (MRBM), dan short-range ballistic missile (SRBM). Penguatan aliansi tersebut tidak keluar dari prinsip pasifisme Jepang.

Prinsip pasifisme cenderung membatasi kapabilitas militer Jepang termasuk peran yang dimiliki Jepang dalam aliansi Jepang-Amerika Serikat. Setelah Jepang melakukan reinterprestasi prinsip pasifisme tersebut, kerjasama aliansi Jepang - Amerika Serikat yang berpedoman pada sebuah guideline semakin diperluas peran Jepang dengan adanya kebijakan *Proacitve Contribution to Peace*.

Penguatan kerjasama tersebut juga merupakan bentuk dari peningkatan kapabilitas militer Jepang selama reinterprestasi Pasal 9 konstitusi Jepang. The Guideline for Japan - U.S. Defense Cooperation yang dikeluarkan pada 2015 berisi panduan untuk aliansi kedua negara dalam bertindak dalam kerangka kerjasama pertahanan. Jepang dapat memainkan peran yang lebih luas dalam melindungi wilayah udara, mencegah serangan rudal balistik, melindungi wilayah maritim. Serta melindungi serangan yang terjadi di darat⁶³.

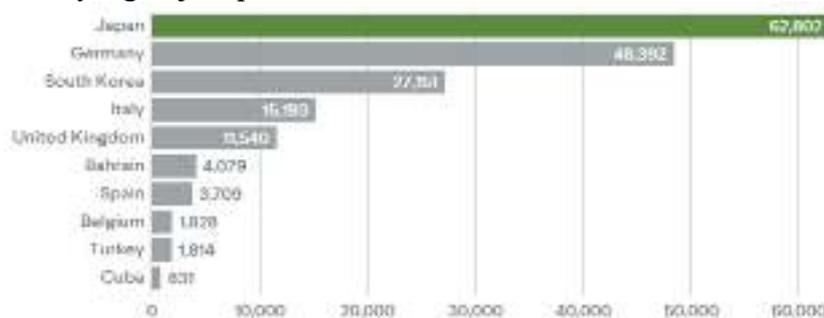
Perang dapat terjadi apabila dalam suatu kawasan tidak terjadi balance of power. Seperti dalam pemikiran Waltz yaitu perang dapat digunakan oleh negara sebagai metode untuk memperoleh kebutuhan dasar dari negara seperti keamanan dan karena keadaan internasional anarkis memungkinkan negara untuk berperang meskipun tidak ada agresor terhadap negara tersebut. Peningkatan kapabilitas militer Jepang digunakan sebagai penunjang pada penguatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat sehingga

⁶³ “The Guidelinesfor Japan-U.S. Defense Cooperation” Japan Ministry of Defense,

Jepang dapat mewujudkan balance of power di kawasan Indo Pasifik. Hal tersebut sejalan dengan asumsi pemikiran realis yaitu negara pada dasarnya merupakan unit, sehingga dalam kondisi internasional yang anarki dan tidak menawarkan perlindungan negara harus melakukan upaya sendiri untuk meningkatkan keamanannya melalui kemampuan relatif mereka⁶⁴.

• **Terjadinya Security Dilemma di Kawasan Indo Pasifik**

Security dilemma atau dilema keamanan merupakan ide teoritis dalam hubungan internasional yang dikembangkan oleh tokoh pemikir seperti Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis. Teori dilemma keamanan dalam model spiral yang lebih luas merupakan teori perang dan perdamaian yang kuat dan dilihat melalui interaksi. Menurut Herbert Butterfield, dilema keamanan dapat mendorong negara berperang meskipun masing-masing dari mereka tidak memiliki keyakinan untuk saling menyakiti. Butterfield mengemukakan proposisi tentang dilema keamanan, pertama yaitu sumber utama dilema keamanan adalah rasa takut, kedua dilema keamanan memerlukan ketidakpastian, ketiga dilemma keamanan sejatinya muncul karena ketidaksengajaan, keempat dilema keamanan menghasilkan hasil yang tragis, kelima dilema keamanan dapat diperburuk oleh faktor psikologis, dan keenam dilema keamanan merupakan penyebab utama dari segala konflik yang terjadi pada manusia⁶⁵.



Sumber: U.S. Office of the Secretary of Defense

Gambar 1. Jumlah Personil AS di Negara-Negara

Dari data di atas menunjukkan jumlah personil militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lainnya. Jepang di bawah rezim Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015 menafsirkan kembali konstitusinya dalam suatu langkah bersejarah. Revisi ini memungkinkan penggunaan aspek militer Jepang untuk pertama kalinya akan tetapi dalam kondisi terbatas. Perubahan ini juga membantu membuka peluang besar Jepang dan Amerika Serikat dalam merevisi pedoman militer pertahanan keduanya sekali lagi. Kedua negara lebih fokus pada aliansi yang terbangun sebagai tameng ancaman keamanan pada saat ini serta memperluas lagi jangkauan kerjasama dalam bidang pertahanan militer satu sama lain (Council on Foreign Relations, 2024).

Jepang di masa pemerintahan perdana Menteri Shinzo Abe mengalami perubahan signifikan dalam aspek politik dan keamanannya. Salah satu kebijakan yang di buat Abe adalah menguatkan peran negaranya dalam bidang militer dan Jepang. Abe beserta kabinetnya menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang di sebut dengan pasal 9.

⁶⁴ Peter Toledo, "Classic Realism and the Balance of Power Theory" *Glendon Journal of International Studies*,

⁶⁵ Shiping Tang, "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis", 590.

Sebagai pemimpin tertinggi Jepang, Shinzo Abe berupaya melakukan gerakan kampanye di kalangan masyarakat serta kalangan politik Jepang bahwa Jepang butuh untuk membentuk sebuah kekuatan pertahanan militer yang mumpuni. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan situasi keamanan di kawasan. Di sisi lain dengan bangkitnya ekonomi negara-negara di kawasan seperti China, Korea Selatan serta ancaman kepemilikan senjata pemusnah massal milik Korea utara nampaknya menjadi alasan utama Jepang harus melakukan perubahan serta transformasi dalam bidang pertahanan dan keamanan negaranya.

Asia Timur menjadi tempat tinggal bagi negara-negara yang sekarang memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar dalam segala aspek. Bangkitnya negara-negara di kawasan ini bukan hanya menarik perhatian negara lain di luar kawasan untuk melakukan kerjasama internasional namun juga dapat menjadi pemicu konflik besar dalam dunia internasional. China sebagai negara yang mendominasi ekonomi dunia dewasa ini serta Korea Utara yang secara massif melakukan percobaan rudal balistiknya membuat Jepang merasa khawatir atas eksistensi kedua negara tersebut. Atas dasar inilah mengapa Jepang secara bertahap juga melakukan perubahan terhadap peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan nasionalnya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis bagaimana perspektif security dilemma di kawasan Asia Timur terhadap transformasi pertahanan dan keamanan Jepang.

Jepang menimbulkan kekhawatiran bagi Cina terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan. Kekhawatiran tersebut dapat menciptakan ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan dan memperluas konfrontasi antar negara-negara yang memiliki klaim atas wilayah Laut Cina Selatan. Jepang mengikuti latihan Malabar (Malabar exercise) bersama India dan Amerika Serikat. Salah satu peralatan militer Jepang yang diikutsertakan dalam latihan tersebut adalah kapal perang Izumo. Kapal perang Izumo tersebut melakukan pemberhentian di empat negara sebelum mengikuti latihan Malabar dan melewati kawasan Laut Cina Selatan dimana sedang terjadi ketegangan di kawasan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan proposisi Butterfield mengenai dilema keamanan yaitu dilema keamanan muncul sejatinya dikarenakan ketidaksengajaan.

Rute yang dipilih oleh kapal perang Izumo Jepang dekat dengan wilayah yang sedang di sengkatakan sehingga muncul persepsi bahwa kapal perang tersebut merupakan sebuah ancaman baru bagi pihak yang tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Jepang maupun salah satu negara yang terlibat dalam sengketa. Spesifikasi dari kapal Izumo tersebut yaitu memiliki panjang 248 meter dan lebar 38 meter, lebih besar dari kapal dengan jenis sama yang beroperasi di angkatan laut Spanyol dan Italia. Kapal tersebut juga memiliki sistem radar terbaru dan mampu membawa sekitar 14 helikopter seperti MCH-101 dan SH-60K dengan kelengkapan untuk peperangan anti-kapal selam.

Jepang membuat Cina khawatir akan keamanan dan posisinya di Laut Cina Selatan. Kepulauan Sparty yang sudah dilakukan pengembangan berupa eskalasi militer oleh Cina dikhawatirkan akan rentan terkena serangan apabila Jepang ingin untuk melakukan serangan, seperti proposisi yang dinyatakan oleh Butterfield mengenai ketidakpastian dalam dilema keamanan.

Menurut Jervis, inti dari argumen dilema keamanan adalah peningkatan keamanan dari satu negara membuat negara lain merasa kurang aman, bukan karena kesalahan penafsiran atas kesan permusuhan, namun dikarenakan sifat anarki dari hubungan internasional. Apabila Cina mempresepsikan Jepang sedang meningkatkan keamanannya dengan melakukan peningkatan kapabilitas militernya seperti "mempamerkan" kekuatan armada kapal perang Izumo miliknya, maka terjadi dilema keamanan bagi Cina. Kapal

Izumo tersebut membahayakan karena dapat dikatakan sebagai penghancur helikopter (helicopter destroyer) serta juga merupakan kapal kombatan atau petarung di area permukaan laut terbesar yang beroperasi dengan militer Jepang.

Selain spesifikasi kapal Izumo, pengerahan kapal Izumo tersebut juga menjadi hal yang baru bagi Angkatan Laut Jepang (Japan Maritime Self Defense Force) dengan tujuan untuk melindungi aset dari aliansinya yaitu Amerika Serikat dalam hal menguatkan kerjasama keamanan diantara kedua negara⁶⁶. Penguatan aliansi yang terbentuk antara kedua negara tersebut memiliki kecenderungan sebagai sebuah dilema keamanan bagi Jepang. Jepang melihat eskalasi kekuatan militer yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan sebagai sesuatu yang dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Indo Pasifik. Konflik Laut Cina Selatan dapat berubah menjadi sebuah perang meskipun terdapat ketidakpastian dalam dilema keamanan tersebut. Menurut Butterfield, dilema keamanan dapat mempengaruhi negara untuk melakukan peperangan meskipun kemungkinan negara tersebut tidak memiliki tujuan untuk menyakiti satu sama lain.

Naiknya tingkat anggaran militer dari negara-negara di kawasan Indo Pasifik juga menunjukkan bahwa negara-negara tersebut merasa tidak aman atas menguatnya keamanan dan kapabilitas Jepang yang dikenal sebagai negara penganut prinsip pasifisme. Negara-negara di kawasan Indo Pasifik yang memiliki peningkatan pada anggaran militernya dari periode 2014 hingga 2016 yaitu India, Korea Selatan, Cina, dan Australia. Pada 2014, Jepang melakukan reinterpretrasi Pasal 9 konstitusi Jepang dengan tujuan untuk dapat memungkinkan Jepang melakukan collective selfdefense serta berpartisipasi dalam operasi keamanan kolektif Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Reinterpretrasi tersebut menjadikan Jepang lebih agresif dalam menunjukkan kapabilitas militernya meskipun dalam konteks lewatnya kapal perang Izumo Jepang di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki tujuan untuk melakukan penyerangan terhadap aset militer Cina di kawasan tersebut yang nantinya dapat menyebabkan instabilitas. Bahkan, kekuatan militer Jepang menempati urutan ke 7 dari 133 negara pada 2017. Total populasi Jepang yaitu 16.702.133 jiwa dengan total personil militer sekitar 311.875 orang. Kekuatan pesawat udara (aircraft) Jepang berjumlah 1.594-unit yang terbagi dalam beberapa jenis dan jenis pesawat udara terbanyak yaitu pesawat pengangkut (transport aircraft) sebanyak 481 unit. Aset angkatan laut Jepang berjumlah 131 dengan jenis terbanyak yaitu kapal penghancur (destroyer) sebanyak 42 unit. Jenis aset dari angkatan darat Jepang terbanyak yaitu kendaraan tempur lapis baja (armored fighting vehicles) dengan 2.850-unit serta tank tempur sebanyak 700 unit.

Kapal perang Izumo termasuk ke dalam aset angkatan laut Jepang. Meskipun jumlah pesawat terbang Jepang terhitung banyak, Jepang lebih menonjolkan pengembangan kekuatan militernya di aset angkatan laut Jepang (Maritime Japan Defense Force). Hal tersebut dilakukan karena di kawasan Indo Pasifik terdapat konflik teritorial yang berhubungan dengan wilayah kelautan seperti pada sengketa Laut Cina Selatan, Pulau Dokdo, dan juga kepulauan Senkaku.

Dilema keamanan menurut Herz digambarkan sebagai “gagasan struktural” dimana sebuah negara melakukan upaya untuk menjaga kebutuhan keamanan negaranya. Terlepas dari apapun niatnya, upaya tersebut memicu ketidaknyamanan bagi negara lain terutama negara yang berada di sekitarnya. Menurut Nick Wheeler dan Ken Booth, persiapan militer suatu negara dapat menciptakan sebuah dilema keamanan sehingga

⁶⁶ Franz-Stefan Gady, "Japan Dispatches Biggest Warship to Protect US Navy Vessel, Putting New Security Law to Work" The Diplomat,

muncul ketidakpastian dalam pandangan yang dihasilkan dari pihak lain apakah hal tersebut hanya bertujuan untuk melakukan pertahanan atau bertujuan untuk melemahkan keamanan pihak lain⁶⁷.

Konflik teritorial di Laut Cina Selatan meningkat setelah Cina melanjutkan pembangunan fasilitas militer yaitu tempat penampungan rudal (missile shelters) serta fasilitas komunikasi radar di Fiery Cross, Mischief, dan terumbu karang Subi pada gugusan kepulauan Spartly. 148 Persiapan militer tersebut menjadikan stabilitas keamanan di kawasan terancam karena dapat sewaktu-waktu fasilitas tersebut digunakan oleh Cina melalui sikap agresif terhadap negara lain.

Selain itu, pengembangan kekuatan nuklir Korea Utara juga merupakan bentuk dari persiapan militer. Kemampuan dari nuklir Hwasong-13 dan Hwasong14 lebih dari 10.000 Km. 149 Korea Utara terlihat memiliki tujuan untuk melakukan pelemahan keamanan bagi negara-negara di kawasan Asia terutama pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ditembakkan dari Sunan melewati Jepang dan mendarat di Samudra Pasifik 2.200 Km sebelah timur wilayah Tanjung Erimo, Jepang.

KESIMPULAN

Jepang merevisi konstitusi pasifisme yang mengizinkan Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Revisi tersebut berupa reinterpretrasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang diperlukan untuk memperkuat pertahanan Jepang dari ancaman. Selain ancaman, Jepang juga menginginkan adanya kontribusi lebih bagi Amerika Serikat yang merupakan aliansinya dengan melaksanakan Collective Self Defense seperti membantu Amerika Serikat dalam sebuah peperangan dan meringankan beban Amerika Serikat dalam melindungi Jepang atau aliansi Amerika Serikat saat mendapatkan serangan dari negara lain. Jepang melakukan pengembangan kapabilitas militer tersebut melalui National Defense Program Guidelines (NDPG) 2014 serta Medium Term Defense Program 2014-2018.

Reinterpretrasi konstitusi pasifis menjadikan Jepang memperluas perannya di kawasan Indo Pasifik. Ketegangan dalam konflik Laut Cina Selatan adalah salah satu alasan dari perluasan tersebut. Pentingnya wilayah Laut Cina Selatan mengharuskan Jepang turut andil dalam memberikan dukungan. Jepang memberikan bantuan kepada negara-negara yang bersengketa dengan Cina pada konflik Laut Cina Selatan. Bantuan tersebut seperti pemberian kapal patroli kepada Vietnam dan Filipina. Terlebih lagi, keagresifan Cina dalam berhubungan dengan negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya dan pengembangan persenjataan bersifat offensive menimbulkan kekhawatiran di kawasan.

Peningkatan kapabilitas militer Jepang seperti melakukan reinterpretrasi konstitusi Pasal 9 Jepang dan penguatan kerjasama aliansi Jepang - Amerika Serikat memberikan pengaruh bagi kawasan Indo Pasifik. Negara di kawasan Indo Pasifik seperti Cina, India, dan Australia melakukan peningkatan anggaran militernya. Selain itu, Jepang mulai melakukan kerjasama pertahanan secara aktif dengan negara-negara di kawasan Indo Pasifik seperti India, Australia, Filipina, dan Korea Selatan. Keaktifan Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya setelah reinterpretrasi konstitusi Pasal 9 Jepang menimbulkan kekhawatiran dan juga peluang bagi negara-negara di kawasan Indo Pasifik. Terlepas dari kehadiran militer Cina yang menimbulkan ketegangan di wilayah Laut Cina

⁶⁷ Paul Roe, "The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a 'Tragedy'?", 184

- Devyanto, Ferri. "Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non-Tempur di Iraq Tahun 2004-2008". Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga 3 (Maret 2014)
- Donnelly, Jack. *Realism and International Relations* (Cambridge: Cambridge University University Press, 2004)
- Dormandy, Xenia. "Asia Pacific Security A Changing Role for the United States" Chatham House Report (April 2014)
- Faisol, Wildan. "Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014" Jurnal UNEJ Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2015)
- Gill, Bates. "Pivotal Days US-Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration", Research Paper The royal Institute of Internasional Affairs (Juni 2017)
- Goh, Evelyn. "How Japan Matters in The Evolving East Asian Security Order" Royal Institute of International Affairs 87 (Juli 2011)
- Irsan, Abdul. *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Izumikawa, Yasuhiro. "Explaining Japanese Antimilitarism: Normative and Realist Constraints on Japan's Security Policy", *International Security* The MIT Press 35 (2010)
- Jeong, Il Young. "Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan". The Journal of East Asian Affair Institute for National Security Strategy 26 (2012)
- Joko P, Adi. "Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Dampaknya Terhadap Keamanan di Asia Timur", Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim 7 (Juni 2010).
- Keir, Richard. "The Australia-Japan Defence Relationship: improving interoperability at the operational level" *Indo-Pacific Strategic Papers Centre for Defence and Strategic Studies* (November 2015)
- Kumar Khera, Kishore. "International Military Exercises: An Indian Perspective". *Journal of Defence Studies* 11 (September 2017)
- Lestari, Suci. "Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan Militer di Darwin Australia Tahun 2011" Jurnal FISIP Universitas Riau 2 (Oktober 2015)
- Lind, Jennifer. "Japan's Security Evolution". *Policy Analysis* Cato Institute 788 (Februari 2016)
- Menenberg, Aaron. "Collective Defense: Abe's New Security Plan", *World Affairs* Sage Publications 177 (Oktober 2014).
- Novia, Renni. "Kebijakan Keamanan Jepang terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim NonProliferasi Nuklir (Periode 2003-2011)" *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 2 (2016).
- Nugraha, Athanasius. "Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan". *Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia* (Oktober 2011)
- Nurdin R, Angga. "Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat". *Hubungan Internasional Universitas Jendral Ahmad Yani Cimahi* 2 (Juli 2017)
- Odgaard, Liselotte. *The Balance of Power in Asia-Pacific Security*. (New York:Routledge, 2007)
- P.R, Viotti dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory* 4 th edition. New York: Pearson Education, Inc, 2010.

- Paul. T.V, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann. *Balance of power, Theory and Practice in the 21st Century* (California: Stanford University Press, 2004)
- Raco, Jozef R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Rehman, Iskandar. "India: the Next Superpower?: the Military Dimensions of India's Rise". London School of Economics and Political Science IDEAS (Mei 2012)
- Roe, Paul. "The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a 'Tragedy'?". *Journal of Peace Research* 36 (Mar., 1999)
- Roza, Rizki. "Dampak Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan". Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI 5 (Oktober 2013)
- Roza, Rizki. "Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan". Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPRI RI 4 (September 2012)
- Roza, Rizki. "Perluasan Peran Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik". Pengkajian Pengolahan
- Satris, Rezki. "Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik" *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1 (Januari 2015)
- Smith, Steve. ed, *Political Realism in International Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)
- Snyder, Jack. "One World, Rival Theory". *Foreign Policy Washingtonpost.Newsweek Interactive* 145 (Desember 2004)
- Stans, Jill, dkk. *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes* (London: Pearson Education, 2010)
- Tang, Shiping. "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis", *Security Studies*, Taylor & Francis Group (Oktober 2009)
- Toledo, Peter. "Classic Realism and the Balance of Power Theory" *Glendon Journal of International Studies*,
- Watanabe, Yoshikazu, dkk. *The U.S.-Japan Alliance and Roles of The Japan Self-Defense Forces: Past, Present, and Future*. (Washington: Sasakawa Peace Foundation ,2016)